

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penataan kota dari aspek kebersihan merupakan isu nasional yang tidak kunjung selesai di setiap kota di Indonesia. Penyebabnya adalah tingkat populasi penduduk yang semakin tinggi ditambah dengan tingkat kepedulian masyarakat yang lemah dalam menjaga kebersihan, seperti membuang sampah pada tempatnya, bangunan dan fasilitas kota yang tidak teratur, begitu pula dengan bertambahnya sampah visual (baliho, iklan produk, iklan politik, dan seterusnya). Permasalahan ini muncul setiap tahun seiring dengan meningkatnya kebutuhan kota yang semakin kompleks. Peran pemerintah dan agen pembaharu (*agent of change*) serta masyarakat luas merupakan indikator utama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi karena hilangnya kemitraan antara pemerintah, agen pembaharu (*agent of change*) dan masyarakat tentu akan melahirkan kesembrautan sistem maupun regulasi penanganan kebersihan dan keindahan kota.

Wacana kebersihan khususnya tentang problematika penanganan sampah yang menjadi *trending topic* dalam pemberitaan media massa dan media elektronik memberikan penegasan bahwa kebersihan masih menjadi persoalan sosial yang mengepung kehidupan kota. Lalu yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah dimanakah pertautan antara visioner kota dalam aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan (3K) Kota dengan perilaku sosial yang cenderung mengingkari visi tersebut. Tentu untuk menjawabnya dibutuhkan penelusuran dalam berbagai dimensi sosial.

Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar, sekaligus merupakan gerbang ilmu pengetahuan di wilayah timur Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya arus migrasi pendidikan, ekonomi dan sosial-politik wilayah timur. Tentunya tidak terlepas dari problematika penataan kota khususnya masalah kebersihan sebagaimana yang dialami oleh kota-kota lain.

Berdasarkan survey dari Ikatan Ahli Perancangan Indonesia (IAP) yang telah merilis daftar kota di Indonesia yang dianggap nyaman untuk ditinggali atau Indonesia *Most Livable City Index* 2014. Dari survey yang dilakukan tersebut ada tujuh kota yang memiliki nilai di atas rata-rata yang paling nyaman untuk dikunjungi dan ditinggali (Balikpapan, Solo, Malang, Yogyakarta, Makassar, Palembang, Bandung). Survey tersebut didasarkan pada kriteria diantaranya: kualitas penataan kota, jumlah ruang terbuka, perlindungan bangunan bersejarah, kualitas kebersihan lingkungan, tingkat pencemaran lingkungan, ketersediaan angkutan umum, kualitas kondisi jalan, dan kualitas fasilitas pejalan kaki. Hasil survey tersebut menyebutkan Kota Makassar masuk dalam tujuh daftar kota di Indonesia yang paling nyaman untuk dikunjungi dan ditinggali. (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/12/071700026/Inilah.Tujuh.Kota.di.Indonesia.yang.Paling.Nyaman.Ditinggali>)

Makassar semakin gencar mempromosikan dirinya sebagai destinasi Kota dengan jargon “*Menuju Kota Dunia*”. Salah satu contohnya pada masa pemerintahan Walikota Iham Arief Sirajuddin selama dua periode (tahun 2003-2008 dan 2009-2014) menyebutkan bahwa kota Makassar sebagai kota dunia yang berbasiskan kearifan lokal. Selanjutnya pada tahun 2009 diterbitkan lagi slogan atau tagline “*Maccassart the Great Expectation*”, yang diharapkan mampu membangun *image* kota Makassar ke arah yang lebih baik. Selain *tagline* tersebut ada beberapa pula istilah-istilah dalam berbagai bidang, misalnya Makassar hijau, Makassar bersih, Makassar gemar membaca. Terakhir tahun 2014 setelah pemerintah wali kota terpilih Ir. Ramdhan Pomanto, meluncurkan kembali sebuah *tagline* berupa Makassar *Sombere* (ramah) atau Makassar *great hospitality*, dengan salah satu program berupa “*Makassar tidak rantasa*”, yang dimana program tersebut menjadi inovasi baru dari pemerintah Kota Makassar dalam menata Makassar lebih baik ke depan.

Program *Makassar tidak rantasa* berbanding terbalik dengan permasalahan kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: Mentalitas masyarakat yang belum berubah (*an progres*), aspek penataan kota mulai dari gang sampai jalanan umum belum tertata rapi, aspek kebersihan

dengan tata kelola sampah yang belum memadai sampai pada fasilitas sampah (termasuk kendaraan sampah) yang masih minim. Walaupun inisiatif pemerintah kota telah menambah kendaraan kebersihan, namun populasi masyarakat Makassar yang terus meningkat tidak berbanding lurus dengan jumlah fasilitas kebersihan yang ada di Kota Makassar.

Permasalahan kota dari aspek kebersihan juga didukung oleh karakter atau perilaku masyarakat yang beragam sehingga hal ini menarik untuk ditinjau secara holistik. Perilaku masyarakat Makassar yang relatif tidak peduli dalam menyikapi masalah kebersihan erat kaitannya dengan sistem kebudayaan (pendidikan atau pengetahuan, system kelembagaan, industri, agama, estetika, system ekonomi dan seterusnya). Hal ini tentu dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang sudah berjalan dalam waktu yang lama sehingga membentuk paradigma dan pola hidup yang semakin kuat. Hilangnya sadar kebersihan kota akan membentuk tradisi baru dalam mereduksi program kebersihan yang mengakibatkan Kota menjadi memprihatinkan. Hal demikian berimplikasi pada resiko kehidupan sosial dalam segala aspek sektorial.

Berdasarkan data yang masuk tahun 2015 pada Sub Bagian Pengaduan pada Bagian Humas Sekretariat Kota Makassar, total jumlah aduan pada bulan April, sebanyak 133 aduan, enam diantaranya terkait kebersihan. Sedangkan di bulan Mei sebanyak 126 aduan, sembilan diantaranya terkait masalah kebersihan. Pada tanggal 12 Juni pengaduan tentang kebersihan mengalami peningkatan menjadi 13 aduan.(Sumber: Humas sekretariat Kota, 2015).

Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan, 980 RT dan 4.867 RW sebagaimana dengan tabel berikut:

No.	Kode. Wil.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentasi Luas (%)	Kel.	RT	RW
1	010	Mariso	1,82	1,04	9	47	246
2	020	Mamajang	2,25	1,28	13	56	238
3	030	Tamalate	20,21	11,50	10	69	369
4	031	Mamajang	9,23	5,25	10	37	139
5	040	Makassar	2,52	1,43	14	45	169
6	050	U. Pandang	2,63	1,50	10	57	257

7	060	Wajo	1,99	1,13	8	77	464
8	070	Bontoala	2,10	1,19	12	50	199
9	080	Ujung Tanah	5,94	3,38	12	90	473
10	090	Tallo	5,83	3,32	15	108	532
11	100	Panakuk kang	17,83	9,70	11	105	505
12	101	Manggala	24,14	13,73	6	66	366
13	110	Biringkanaya	48,22	27,43	7	106	566
14	111	Tamalanrea	31,84	18,12	6	67	330
<b>Makassar</b>			175,77	100 %	143	980	4.867

Sumber : Bappeda - BPS, Makassar dalam Angka 2013.

Salah satu Kecamatan yang ada di Kota Makassar yaitu Kecamatan Mariso yang memiliki jumlah Kelurahan sebanyak 9, RT sebanyak 47 dan RW sebanyak 246 (Bappeda-BPS, Makassar dalam Angka 2013). Kecamatan Mariso menjadi target dari program *Makassar tidak rantasa* karena kecamatan tersebut merupakan daerah yang terletak di pinggir kota yang berbatasan dengan Pantai dan memiliki variasi kehidupan perumahan masyarakat yang tergolong kumuh dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah kota untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah kota membuat program *Makassar tidak Rantasa* sebagai suatu inovasi dan solusi dalam menangani permasalahan kebersihan yang ada.

Berangkat dari permasalahan ini dan *survey* dilapangan, maka Walikota Makassar membuat kebijakan yaitu program *Makassar tidak rantasa*. Hal tersebut ditegaskan dalam Keputusan Walikota Makassar No: 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian wilayah binaan satuan kerja perangkat daerah pelaksanaan program *Makassar tidak rantasa* dengan mewajibkan kepada para Camat untuk segera membentuk Forum Kampung Bersih dan Hijau tingkat Kecamatan guna mendukung program *Makassar tidak rantasa* dengan melibatkan para fasilitator dan kader lingkungan wilayah masing-masing. Sebagai bentuk solusi untuk menangani permasalahan kebersihan yang ada. Sekaligus program tersebut menjadi harapan dan filosofi Makassar yang

memegang prinsip *siri'* (malu) dalam hal ini Makassar akan malu ketika terlihat jorok atau sembraut dalam penataannya.

Persoalan *rantasa* bukan hanya pada persoalan kebersihan semata, tetapi juga pada pola pikir dan perilaku masyarakat. Masyarakat cenderung memiliki pola pikir gengsi, contohnya tidak mau memungut sampah orang lain karena merasa akan dianggap sebagai pembantu, rendahan dan lain-lain. Selanjutnya perilaku atau kultur masyarakat yang sudah terbiasa membuang sampah bukan pada tempatnya menjadi pemicu dan tantangan dalam mewujudkan Makassar yang tidak *rantasa*. Melalui program ini diharapkan akan menjadi langkah awal untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat Makassar untuk lebih disiplin dan peduli, dan ini tentunya harus dimulai dari para pemimpin dan masyarakat luas itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2005) yang berjudul sosialisasi program *Makassar tidak rantasa* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: formulasi swot yang menunjukkan bahwa kekuatan program *Makassar tidak rantasa* adalah tingginya partisipasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan program *Makassar tidak rantasa* dan didukung oleh sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program *Makassar tidak rantasa*, sedangkan kelemahan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya sosialisasi dengan program *Makassar tidak rantasa*, dan selain itu masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang tersedia. Kemudian dilihat dari peluang yang dihadapi saat ini adalah adanya peran serta, mobilisasi dan kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan program *Makassar tidak rantasa*, dan disamping itu ancaman yang dihadapi adalah dalam pelaksanaan program *Makassar tidak rantasa* masih kurangnya sinergi antara Pemerintah kota Makassar dengan Dinas Kebersihan lain seperti RT/RW dalam program Makassar tidak *rantasa* dan selain itu kebijakan program *Makassar tidak rantasa* belum efektif berjalan, dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang tersedia.

Jadi, pada hakikatnya program *Makassar tidak rantasa* yang menjadi program pemerintah kota Makassar haruslah disertai dengan partisipasi yang

tinggi oleh agen pembaharu (*agent of change*), masyarakat dan pemerintah. Keterlibatan masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam mewujudkan program tersebut serta keteladanan dari agen pembaharu (*agent of change*) juga menjadi kunci terhadap berhasilnya sebuah program khususnya program *Makassar tidak rantasa*. Hal ini juga diungkapkan oleh Rogers (dalam Hanafi, 1986, hlm. 98), bahwa agen pembaharu merupakan “tangan-tangan” lembaga pembaharu, yakni badan, dinas instansi atau organisasi yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan di masyarakat.

Selanjutnya, kesuksesan program *Makassar tidak rantasa* tidak cukup hanya dengan mengandalkan modal materi atau ekonomi semata. Tetapi juga dibutuhkan modal-modal yang lain. Modal yang dimaksud adalah modal sosial dari masyarakat. Modal sosial (*social capital*) adalah salah satu faktor penting yang menentukan sebuah program dapat berjalan dengan baik. Peranan modal sosial, tidak kalah pentingnya dengan infrastruktur lainnya, sehingga upaya untuk membangun modal sosial perlu diprioritaskan demi kesuksesan program *Makassar tidak Rantasa*. Pembentukan modal sosial dapat mempercepat dalam merealisasi sebuah program dengan adanya jaringan (*networks*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*) di dalamnya yang menjadi kolaborasi (koordinasi dan kooperasi) sosial untuk kepentingan bersama.

Fukuyama (2002, hlm 109) aspek kepercayaan atau *trust* merupakan unsur yang sangat esensial di dalam membentuk modal sosial. Kepercayaan merupakan inti dari modal sosial (*core of social capital*). Modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Selanjutnya modal sosial sebagai sesuatu yang merujuk kepada dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota masyarakat secara bersama-sama.

Terkait dengan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini saya akan mendeskripsikan tentang **“Pengembangan Modal Sosial Masyarakat dalam**

**Mewujudkan Program Makassar Tidak Rantasa”** yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana nilai-nilai modal sosial masyarakat di Kecamatan Mariso untuk mendukung program *Makassar tidak rantasa* ?
2. Bagaimana munculnya agen pembaharu (*agent of change*) dalam kehidupan masyarakat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh agen pembaharu (*agent of change*) dalam merekrut pengikutnya untuk mewujudkan program *Makassar tidak rantasa*?
4. Bagaimana agen pembaharu (*agent of change*) memanfaatkan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendukung program *Makassar tidak rantasa*?
5. Bagaimana hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh agen pembaharu (*agent of change*) dan pengikutnya dalam mewujudkan program *Makassar tidak rantasan*?
6. Apa hasil yang diperoleh atau dirasakan oleh masyarakat dari program *Makassar tidak rantasa*?
7. Bagaimana perubahan yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat dengan adanya program *Makassar tidak rantasa*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pertanyaan, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan nilai-nilai modal sosial masyarakat di Kecamatan Mariso untuk mendukung program *Makassar tidak rantasa*.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan munculnya agen pembaharu (*agent of change*) dalam kehidupan masyarakat.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh agen pembaharu (*agent of change*) dalam merekrut pengikutnya untuk mewujudkan program *Makassar tidak rantasa*.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya agen pembaharu (*agent of change*) dalam memanfaatkan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendukung program *Makassar tidak rantasa*.
5. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh agen pembaharu (*agent of change*) dan pengikutnya dalam mewujudkan program *Makassar tidak rantasan*?
6. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil yang diperoleh atau dirasakan dari program *Makassar tidak rantasa*?
7. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perubahan yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat dengan adanya program *Makassar tidak rantasa*?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Secara Teoritis:**

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya modal sosial dan peran agen pembaharu (*agent of change*) dalam mewujudkan program *Makassar tidak rantasa*.
- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan-kebijakan pemerintah kota Makassar pada umumnya dan mengenai pentingnya agen pembaharu (*agent of change*) dalam mewujudkan *Makassar tidak rantasa* pada khususnya.

##### **2. Secara Praktis:**

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif kepada penyelenggara program Pemerintah khususnya tentang program *Makassar tidak rantasa* sebagai wujud kepedulian terhadap masalah

penataan kota serta dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam khasanah penelitian sosial dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial pada umumnya dan sosiologi pada khususnya.

- b. Bagi pemerintah dan instansi/lembaga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan memperkaya hasil penelitian sejenis dalam memperkaya informasi tentang pelaksanaan program *Makassar tidak rantasa*.